

PERKEMBANGAN GERAKAN MAHASISWA ACEH DARI ORDE BARU HINGGA REFORMASI

Putri Adi Tia¹

¹Pendidikan Sejarah, Universitas Jabal Ghafur, Indonesia

*Corresponding author: putriadtia2024@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the development of the student movement in Aceh from the New Order era to the Reformation era, focusing on the role and contributions of students in responding to social injustice, natural resource exploitation, and human rights violations, particularly in the Aceh region. This research employs a qualitative method with a historical approach to reconstruct the socio-political dynamics and patterns of student movements between 1966 and the early 2000s. Data were collected through literature review, archival documentation, and in-depth interviews with movement actors and historical witnesses. The findings reveal that, despite operating under political pressure and restricted space during the New Order regime, Acehnese students actively voiced structural and local issues and became key actors in overseeing the Reform era. During the Reformation period, the opening of democratic space allowed students to more freely organize protests, discussion forums, and solidarity networks. The student movement in Aceh has proven to be a significant socio-political force in advocating for justice, regional autonomy, and democratic transformation in Indonesia.

Keywords: Student Movement, New Order, Reform Era, Social Injustice, Historical Approach, Regional Autonomy.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan gerakan mahasiswa Aceh dari masa Orde Baru hingga era Reformasi dengan menitikberatkan pada peran dan kontribusi mahasiswa dalam merespons ketidakadilan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di wilayah Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk merekonstruksi dinamika sosial-politik dan pola gerakan mahasiswa antara tahun 1966 hingga awal 2000-an. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi arsip, serta wawancara mendalam dengan pelaku dan saksi sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam tekanan dan keterbatasan ruang gerak selama rezim Orde Baru, mahasiswa Aceh tetap aktif menyuarakan isu-isu struktural dan lokal, serta menjadi aktor penting dalam pengawalan Reformasi. Pada era Reformasi, ruang demokrasi yang terbuka memungkinkan mahasiswa lebih leluasa dalam mengorganisasi aksi, forum diskusi, dan jaringan solidaritas. Gerakan mahasiswa Aceh terbukti menjadi kekuatan sosial-politik yang berperan penting dalam memperjuangkan keadilan, otonomi daerah, dan transformasi demokratis di Indonesia.

Kata Kunci: Gerakan Mahasiswa, Orde Baru, Reformasi, Ketidakadilan Sosial, Pendekatan Historis, Otonomi Daerah.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan sejarah perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan serta memperjuangkan hak-hak sipil dan politik di tengah dinamika kekuasaan negara. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, perjalanan bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari ketegangan antara kekuasaan negara dan aspirasi masyarakat sipil. Dalam konteks ini, mahasiswa kerap tampil sebagai agen perubahan yang kritis terhadap kekuasaan yang tidak demokratis. Peran mahasiswa menjadi penting dalam menentukan arah politik bangsa, terutama dalam periode-periode krisis politik nasional (Fautanu, 2025).

Salah satu periode krusial dalam sejarah Indonesia adalah masa Orde Baru (1966–1998), ketika kekuasaan politik sangat terpusat di tangan Presiden Soeharto. Meskipun stabilitas dan pembangunan ekonomi menjadi agenda utama rezim ini, namun pendekatan represif terhadap oposisi politik, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan dominasi militer dalam kehidupan sipil menimbulkan resistensi yang terus berkembang. Dalam suasana yang dikontrol ketat oleh pemerintah, mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang tetap menunjukkan konsistensi dalam menyuarakan keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Gerakan mahasiswa, meskipun dibatasi ruang geraknya, tetap tumbuh melalui ruang-ruang kampus dan jaringan intelektual yang tersebar di berbagai daerah (Wijaya, 2014).

Memasuki akhir 1990-an, krisis ekonomi Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menjadi pemicu utama lahirnya gerakan mahasiswa dalam skala nasional. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto meledak dalam demonstrasi besar-besaran, yang berpuncak pada lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Masa transisi ini dikenal sebagai era Reformasi, ditandai dengan terbukanya ruang demokrasi, munculnya kebebasan pers, serta desentralisasi kekuasaan ke daerah-daerah. Gerakan mahasiswa kembali memainkan peran penting dalam mengawal perubahan, mendorong reformasi hukum, pemilu yang lebih demokratis, dan penguatan masyarakat sipil. Salah satu gerakan mahasiswa yang terbentuk adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang bertujuan untuk memprotes Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melakukan aksi untuk memperbaiki kondisi politik di Indonesia serta untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat tentang eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh (Tirtosudarmo, 2022).

Di masa Orde Baru, Aceh mengalami marginalisasi politik dan ekonomi yang cukup signifikan, terutama terkait eksploitasi sumber daya alam seperti gas alam di Lhokseumawe yaitu PT Perta Arun Gas (PAG) tanpa kontribusi yang seimbang bagi masyarakat lokal. Ketimpangan ini kemudian memunculkan gerakan perlawanan bersenjata melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang didirikan pada tahun 1976. Namun, di sisi lain, muncul pula gerakan sipil khususnya dari kalangan mahasiswa yang menyuarakan ketidakadilan sosial, kekerasan negara, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama operasi militer di Aceh. Pada masa Orde Baru, gerakan mahasiswa di Aceh bergerak dalam keterbatasan, namun tetap konsisten mengangkat isu pelanggaran HAM, ketidakadilan distribusi kekayaan, dan pentingnya otonomi daerah. Saat memasuki era Reformasi, ruang gerak yang lebih terbuka memungkinkan mahasiswa Aceh lebih leluasa mengorganisasi aksi, forum diskusi, dan aliansi solidaritas, baik secara internal maupun eksternal, untuk mendorong perubahan politik yang lebih adil bagi Aceh. Mahasiswa Aceh, baik yang berada di daerah maupun yang tergabung dalam organisasi eksternal kampus di kota-kota besar seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Pidie dan bahkan di luar Aceh seperti Jakarta dan Yogyakarta, turut berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif terhadap isu-isu lokal dan nasional (Jayanti, 2013a).

Berdasarkan latar sejarah dan dinamika tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat tema “*Perkembangan Gerakan Mahasiswa Aceh dari Orde Baru hingga Reformasi*” sebagai fokus kajian sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peran, strategi, dan kontribusi mahasiswa Aceh dalam merespons kondisi politik nasional dan lokal pada dua periode krusial dalam sejarah Indonesia modern. Selain itu, kajian ini juga ingin menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa Aceh tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik Aceh yang kompleks, serta menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi dan desentralisasi pasca-Reformasi. Dengan menelusuri perkembangan gerakan ini, diharapkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai relasi antara gerakan mahasiswa dan perubahan sosial-politik di Aceh dapat diperoleh, sekaligus memperkaya historiografi gerakan mahasiswa di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis sebagai kerangka utama dalam mengkaji perkembangan gerakan mahasiswa Aceh dari masa Orde Baru hingga era Reformasi. Pendekatan historis dipilih karena penelitian ini bertujuan merekonstruksi dinamika sosial-politik dan peran mahasiswa dalam konteks ruang dan waktu tertentu, khususnya antara tahun 1966 hingga awal 2000-an. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menelusuri jejak historis gerakan mahasiswa, menggali perubahan pola gerakan, serta menempatkan setiap bentuk aktivisme dalam relasi yang erat dengan struktur kekuasaan dan kondisi sosial masyarakat Aceh pada masanya.

3. Hasil dan Pembahasan

Tumbangnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun oleh hantaman arus reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, telah semakin memperkuat fakta sejarah bagaimana posisi dan peran mahasiswa dengan gerakannya, menjadi hal penting untuk dikaji dengan lebih seksama dan mendalam tentang latar belakang, motivasi dan dorongan-dorongan yang telah mengkondisikan gerakan mahasiswa Indonesia dalam melihat dan memperjuangkan kondisi-kondisi penindasan dan ketidakadilan (Muzakar, 2019a).

Beberapa kejadian-kejadian yang menjadi latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia, khususnya faktor dari dalam negeri yaitu:

1. Tekanan penindasan dari penjajah yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya, merupakan faktor utama timbulnya rasa harga diri dan rasa kesadaran nasional, yang kemudian melahirkan nafsu untuk melawan penjajah dengan cara Pergerakan Kedaerahan, yang kemudian meningkat menjadi Pergerakan Nasional.
2. Rasa senasib dan sepenanggungan, merupakan bukti bahwa orang-orang Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ingin bersatu melawan penjajah dalam rangka mendirikan negara yang merdeka bebas dari ancaman penjajah atau bangsa manapun juga di dunia ini.
3. Masuknya pendidikan nasional dengan sistem barat, merupakan angin segar untuk menentang keterbelakangan dan kebodohan. Karena dengan masuknya pendidikan sistem barat tersebut, mempercepat proses untuk mencerdaskan bangsa (Oetama, 2001).

Kesadaran ideologi mahasiswa semakin mengkristal semenjak partai dibentuk kembali, berdasarkan maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945. Dapat dipercaya bahwa maksud dari maklumat itu yang mengharapkan partisipasi rakyat dalam rangka perjuangan (revolusi) untuk mempertahankan kemerdekaan, dan diwujudkan dalam bentuk partai politik sebagai organisasi keideologian, membangun persepsi mahasiswa tentang pentingnya peran ideologi di dalam

organisasi sebagai alat perjuangan. Persepsi tersebut terlahir menjadi fakta sosiologis, lewat jalan perjuangan dengan ideologi dan organisasi, dalam bentuk peresmian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tanggal 5 Februari 1947, Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKI) tanggal 25 Mei 1947 dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Disertai dengan pembentukan partai yang seideologi yakni Masyumi (7 November 1945), Parkindo (18 November 1945) dan Partai Katholik (8 Desember 1945) (Wendra, 2021).

Sementara itu di masa revolusi kemerdekaan tersebut, mahasiswa menampilkan dua ciri lainnya sebagai pelengkap atas kesadaran golongan mereka, yaitu profesi dan komunitas dalam arti daerah pemukiman mereka. Maka dikenal organisasi seperti Perhimpunan Mahasiswa Kodokteran Hewan (PMKH) di Bogor, Perhimpunan Mahasiswa Djakarta (PMD), Perhimpunan Mahasiswa Yogyakarta (PMJ), dan Masyarakat Mahasiswa Malang (MMM). Ada baiknya untuk mencatat pula pengaruh ideologi ke dalam pengorganisasian pelajar di masa itu. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) yang dibentuk dalam bulan Februari 1948, adalah hasil fusi di antara Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) sebagai organisasi mahasiswa kiri, dengan Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) yaitu organisasi mahasiswa kiri, dengan Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) yaitu organisasi yang berhaluan sosialis yang dibentuk tanggal 27 September 1947. Sebagai alat perjuangan fisik, malah IPI membentuk Tentara Pelajar (TP) di Jawa Tengah dan TRIP di Jawa Timur (Davidson dkk., 2010).

Sejarah membuktikan bahwa setelah kemerdekaan berhasil direbut, angkatan 45 mulai terkotak-kotak dalam kancah kehidupan politik nasional. Beberapa tokoh angkatan 45 segera masuk ke lingkaran kekuasaan dan menjadi bagian dari kekuatan politik di tahun 50 – 60-an, sebagian dari mereka yang tak berhasil masuk kedalam lingkaran kekuasaan atau mereka yang tersingkir dari lingkaran itu (terutama setelah dicanangkannya Demokrasi Terpimpin⁷⁸ di tahun 1959 oleh presiden Soekarno) mengambil sikap oposisi terhadap Soekarno: mereka mencela orientasi dan keabsahan rezim Soekarno. Oposisi terhadap rezim Demokrasi Terpimpin ini datang dari dua kekuatan: yang pertama berasal dari tokoh-tokoh anti Soekarno di Angkatan Darat; yang kedua dari partai-partai yang dilarang di bulan Agustus 1960 yakni setelah terjadinya pemberontakan PRRI. Di Sumatera, pemberontakan PRRI yang pro barat pecah dalam tahun 1958 sampai dengan tahun 1960. Masyumi, partai Islam yang reformis (memiliki 20 persen di pemilihan umum 1955) dan Partai Sosialis Indonesia (partai kecil dimana anggota-anggotanya sebagian besar terdiri dari para kader dan intelektual pembaharu) terlibat dalam pemberontakan ini. Setelah gagal, kedua partai itu dilarang. Sebagian dari pemimpin mereka --- ditangkap walau tetap memiliki banyak pendukung sipil yang memilih menjadi oposisi terhadap Soekarno, terutama pada ormas yang tetap hidup seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang secara tidak resmi berafiliasi dengan Masyumi atau Gerakan Mahasiswa Sosialis (GEMSOS) yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Masyumi dan PSI melakukan perlawanan bawah tanah pada Soekarno di tahun 1960 – 1965. Mereka terutama mengkritik keterbelakangan dan tidak rasionalnya sikap politik Soekarno yang amat bertolak belakang dengan gagasan-gagasan modern yang dimiliki para oposisi yang dibuat menurut model dari Dunia Barat. Di antara kedua organisasi itu, meskipun lebih kecil PSI-lah yang paling aktif. Partai ini, paling tidak bekas anggota-anggotanya, mempunyai hubungan yang erat dengan para intelektual yang sebagian besar terdiri dari kalangan universitas. Mereka inilah yang menjelang akhir demokrasi terpimpin melakukan aksi-aksi bawah tanah dengan membuat berbagai agitasi (terutama di lingkungan universitas) sambil menunggu datangnya kesempatan baik untuk muncul kembali (Muzakar, 2019).

Sejumlah perwira Angkatan Darat yang anti Soekarno, terutama dari devisi Siliwangi, menunjukkan simpati terhadap PSI. Para cendekiawan bekas anggota PSI aktif dalam berbagai pertemuan, seminar dan colloquium, yang dilakukan bersama para perwira ini di Jawa Barat. Pada kesempatan-kesempatan itu diketengahkan tema-tema yang berhubungan dengan modernisasi di Indonesia dan keharusan Indonesia melakukan pembangunan ekonominya dengan menganut asas ekonomi liberal. Dasar-dasar ideologi oposisi terhadap Soekarno diperjelas untuk kemudian menentukan sebuah strategi bersama. Pada konteks kondisi sosial, politik dan kekuasaan yang terjadi ini kita bisa melihat bagaimana proses kemunculan Angkatan '66 dan memberi peluang bagi mereka untuk memainkan peranan. Munculnya persekutuan antara unsur-unsur Angkatan Darat anti-komunis yang merasa bahwa cita-cita kemerdekaan telah dihinai oleh Soekarno dan karenanya harus dilakukan usaha untuk kembali pada sumber dan semangat '45 sambil membawa Indonesia dekat ke dunia barat dengan bekas anggota-anggota partai terlarang yang menunggu saat kemunculan mereka kembali ke dunia politik.

Angkatan Darat memegang peranan penting dalam tegaknya kekuasaan. Namun Soekarno mencoba membatasi pengaruh mereka dengan tujuan membuat sebuah keseimbangan antara kekuatan Angkatan Darat dan musuh utama mereka, Partai Komunis Indonesia (PKI). Lalu karena kondisi ekonomi dan kritisnya sosial politik waktu itu, memungkinkan munculnya suatu angkatan baru dimana mereka diberi peluang oleh kondisi yang ada untuk memainkan peran. Angkatan tersebut tidak lain adalah angkatan yang muncul pada arena politik pada awal Abdullah Muzakar 75 tahun 1966 bersamaan dengan peralihan kekuasaan pada militer. Kemunculan ini didukung pula oleh membengkaknya jumlah mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Menurut data yang dikutip Harsja W. Bachtiar, bila tahun 1946 – 1947 terdapat 387 orang mahasiswa, maka di akhir tahun 1965 jumlah tersebut melonjak menjadi 280.000 orang mahasiswa. Itu belum termasuk mahasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi Swasta. Catatan penting dalam kurun waktu ini, adalah munculnya berbagai organisasi mahasiswa yang bersifat berafiliasi ke partai politik tertentu. Misalnya HMI (Masyumi), PMII (NU), Sarekat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PSII), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PERTI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, GMKI (Kristen), PMKRI (Katholik), GMNI (PNI) dan CGMI (Muzakar, 2019).

Pertarungan antar kekuatan-kekuatan politik di atas telah juga kemudian membawa pengaruh yang besar bagi polarisasi kehidupan kampus. Sejak sebelum tahun 1955, persepsi bertambah banyaknya mahasiswa serta prospek adanya Pemilihan Umum menyebabkan partai-partai politik tertarik pada dunia perguruan tinggi. Bila sebelumnya perguruan tinggi merupakan satu kelompok sosial yang sedikit sekali terpolitisir dan hanya ditugaskan untuk mencetak elit Indonesia, maka kini ia berubah menjadi satu ajang pertempuran politik. Secara teoritis banyaknya jumlah mahasiswa ini sangat menarik perhatian para Partai Politik saat itu. Maka diciptakanlah kelompok-kelompok mahasiswa dan diusahakan agar berafiliasi pada mereka. Seperti Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) berafiliasi ke PKI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berafiliasi ke Masyumi, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) berafiliasi ke PNI, GMKI dan lain sebagainya. Hal yang mungkin sangat berpengaruh adalah karena pada masa ini pula Indonesia memasuki era demokrasi liberal dimana kebebasan dari tiap-tiap gerakan mahasiswa yang ada berhak dalam menentukan pilihan politiknya sendiri.⁸¹ Namun hal yang menjadi catatan dari analisis Francois Raillon dalam bukunya “Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia” dan Ridwan Saidi dalam “Mahasiswa dan Lingkaran Politik,” menegaskan bahwa proses radikalisasi gerakan mahasiswa 1966 bukanlah dipengaruhi oleh berafiliasinya beberapa gerakan mahasiswa kepada Partai Politik. Namun radikalisasi di perguruan tinggi ternyata lebih ditentukan oleh faktor-

faktor yang lebih khusus. Secara sistematis setiap partai politik menciptakan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi kepada mereka. Dengan demikian mereka mulai memasukkan elemen-elemen pertama dalam debat politik di kalangan mahasiswa (Jazimah, 2013).

Pada tanggal 25 Oktober 1965, Mayor Jenderal Sjarif Thayeb, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) mengumpulkan para tokoh berbagai organisasi mahasiswa nonkomunis di rumahnya. Thayeb mengusulkan untuk membentuk sebuah organisasi Indonesia yang dinamakan Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Seluruh hadirin menyetujui usul Thayeb. Dan KAMI pun berdiri. Tanpa tunggu waktu lama, KAMI menjadi motor utama dari kegiatan-kegiatan Angkatan '66 dan memainkan peranan pokok dalam arena politik selama dua tahun berikutnya. Di dalam tubuh KAMI terdapat dua jenis organisasi mahasiswa reformis: Pertama, organisasi-organisasi berdasarkan keagamaan, seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan mahasiswa Kristen Indonesia). Kedua, organisasi-organisasi non-agama, seperti SOMAL (Sekretariat Bersama Organisasi-Organisasi Mahasiswa Lokal), PELMASI (Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia), GEMSOS (Gerakan Mahasiswa Sosialis), IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). Sepanjang tahun 1966 KAMI melancarkan aksi-aksi dan demonstrasi yang mendapat dukungan dari masyarakat karena sifat mereka yang non-konformis dan tuntutan-tuntutan yang mereka bawa. KAMI juga pandai menggunakan kekuatan para pelajar yang tergabung dalam organisasi mirip dengan KAMI yaitu Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) (Hadi & Kasuma, 2012).

Usia anggota-anggota KAPPI yang begitu muda, kepolosan mereka dan kesan bahwa mereka itu masih lemah merupakan kekuatan-kekuatan psikologis dan taktis yang mereka miliki untuk menguasai jalan-jalan di Ibukota. Selain itu, secara diam-diam KAMI mendapat dukungan tentara yang selalu melindungi mereka dari serangan elemen-elemen tentara dan kekuatan politik yang memusuhi mereka, hal ini ditandai dengan dekatnya KAMI dengan beberapa tokoh militer yang dianggap berpandangan luas dan menjadi pahlawan di mata angkatan '66, seperti Jenderal Dharsono, Kemal Idris dan Sarwo Edhi.⁸⁶ Gerakan mahasiswa '66 telah mampu memainkan posisi strategisnya dalam merespon beberapa kondisi persoalan-persoalan pemerintah Orde Lama. Isu-isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa '66 adalah berkisar pada kondisi yang memang real dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, terutama persoalan keterpurukan ekonomi dan ditambah dengan kudeta yang dilakukan oleh PKI, yang cenderung dilegalkan atau dibiarkan oleh presiden Soekarno, sehingga memunculkan rasa ketidakpuasan rakyat dan khususnya mahasiswa. Pola pergerakan mahasiswa '66 memakai pola-pola non-konformis, dengan menggelar aksi-aksi demonstrasi turun jalan, aksi pemboikotan dan mogok kuliah. Isu pokok yang menjadi tuntutan gerakan mahasiswa yang dipelopori oleh KAMI yang kemudian dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat atau disingkat TRITURA, berisi: 1. Bubarkan PKI, 2. Rombak kabinet dwikora, dan 3. Turunkan harga (Jazimah, 2013).

Peristiwa-peristiwa pada periode ini mempunyai 3 aspek. Pertama, memberikan nilai penting pada angkatan '66 diuji dan diakui. Kedua, membentuk suatu bingkai dimana angkatan '66 diuji dan diakui. Ketiga, Berfungsi sebagai suatu referensi pokok dalam arti bahwa gagasan-gagasan, aksi-aksi dan tingkah laku yang muncul pada waktu itu akan dijadikan model yang patut ditiru disamping sekaligus menampilkan gagasan-gagasan orisinal yang musti diketengahkan. Bila ada jiwa '45 maka adapula semangat '66. Disamping sisi kepeloporan KAMI sebagai lokomotif penggerak aksi-aksi mahasiswa, yang cukup memusingkan penguasa, ada beberapa hal yang KAMI juga ternyata sarat dengan internal "vested interest." Karena memang harus diakui bahwa

komposisi keanggotaan KAMI banyak berasal dari “onderbow” partai-partai dan ormas-ormas di luar mahasiswa, dan sudah tentu secara aspek politis KAMI menjadi ajang pertarungan kekuatan antar beberapa kepentingan partai ataupun ormas-ormas yang ada, ini bisa dilihat sebagaimana yang disinyalir oleh Soe Hok Gie, bahwa Dalam Presidium KAMI Pusat yang berbicara bukanlah suara-suara mahasiswa yang jujur dari kampus-kampus. Tetapi suara-suara SOKSI (Pelmasi), NU (PMII), Muhammadiyah (IMM), Katolik (PMKRI), Parkindo (GMKI), almarhum PSI (GM Sos) dan lainnya. Semua partai yang ada, mulai dari Perti sampai dengan IPKI, terwakili dalam KAMI Pusat. Demikian pula ormas-ormas besar seperti Soksi, Muhammadiyah dan lainlain.⁸⁹ Selama masih ada PKI-Soekarno, KAMI mudah mencari konsensus bersama dalam memformulasikan isu-isu dan pilihan gerakan. Tetapi setelah sasaran bersama hilang, daya pengikat juga hilang, disinilah kemudian kekuatan-kekuatan KAMI yang ada kemudian sarat dengan kepentingan induk organisasinya. Pada tahapan ini kekuatan KAMI mulai pecah dan terkotak-kotak, dan itu tidak hanya terjadi pada tubuh KAMI saja, tapi telah juga membawa implikasi tidak langsung bagi terjadinya pengkotakan baru di dunia mahasiswa (Muzakar,2019).

Perpecahan di dunia politik, melalui KAMI dibawa ke universitas, kepentingan kampus hampir tak terwakili oleh KAMI, KAMI mulai kehilangan basis masa kampus, mahasiswa-mahasiswa tidak melihat lagi kegunaan KAMI yang cuma mengurus politik-politik partai. Sebuah titik awal kematian peran vital KAMI sebagai sebuah gerakan mahasiswa Gerakan mahasiswa Aceh memiliki dinamika yang khas dan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik nasional maupun lokal. Selama masa Orde Baru, ruang demokrasi sangat terbatas akibat sistem pemerintahan otoriter yang menekan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Di tengah situasi yang represif tersebut, gerakan mahasiswa Aceh tetap tumbuh meskipun dalam kondisi serba terbatas dan penuh kehati-hatian. Mereka banyak bergerak secara diam-diam, dengan strategi yang bersifat simbolik dan bertahap, misalnya melalui diskusi kampus, penerbitan buletin alternatif, atau forum-forum kecil yang membahas isu ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam, dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh (Jazimah, 2013).

Salah satu fokus utama gerakan mahasiswa Aceh pada masa Orde Baru adalah penolakan terhadap dominasi militer dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat lokal. Isu-isu seperti penolakan terhadap status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan tuntutan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara menjadi pokok perlawanan. Meski demikian, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan ini tidak selalu terorganisasi dalam satu wadah formal, melainkan tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang cenderung bersifat lokal, seperti kelompok studi mahasiswa atau organisasi kemasyarakatan yang berbasis kampus.

Memasuki masa Reformasi, gerakan mahasiswa Aceh mengalami transformasi yang signifikan. Lengsernya Soeharto pada Mei 1998 membuka ruang demokrasi yang sebelumnya tertutup, dan momentum ini dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk tampil secara lebih terbuka dan militan. Mahasiswa Aceh, baik yang berada di dalam provinsi maupun di luar daerah seperti Yogyakarta, Medan, dan Jakarta, mulai menggelar demonstrasi terbuka, mimbar bebas, dan aksi-aksi solidaritas yang mengangkat isu lokal maupun nasional.

Salah satu bentuk gerakan mahasiswa Aceh yang menonjol pada masa Reformasi adalah tuntutan pencabutan status DOM di Aceh, desakan pengungkapan pelanggaran HAM oleh militer, dan advokasi terhadap hak-hak sipil masyarakat Aceh yang selama ini terabaikan. Di sisi lain, mereka juga memperjuangkan demokratisasi di tingkat lokal dengan mengangkat isu otonomi daerah, transparansi anggaran, serta partisipasi publik dalam pemerintahan daerah. Mahasiswa mulai membentuk aliansi lintas kampus, seperti Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR),

Forum Pers Mahasiswa Aceh (FPMA), hingga organisasi lintas sektor yang bekerja sama dengan LSM dan tokoh-tokoh sipil (Jayanti, 2013).

Gerakan mahasiswa Aceh pada masa Reformasi juga memainkan peran penting dalam mengawal proses perdamaian. Mereka menjadi jembatan antara suara masyarakat sipil dan kekuatan politik yang sedang bernegosiasi di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kampanye, seminar, publikasi alternatif, dan jaringan advokasi, mahasiswa menjadi bagian dari proses penyadaran publik akan pentingnya keadilan, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara non-kekerasan (Syam, 2015).

3. Simpulan dan Saran

Gerakan mahasiswa Aceh mengalami dinamika yang signifikan dari masa Orde Baru hingga pasca reformasi, mulai dari perjuangan dalam keterbatasan ruang demokrasi dan represi militer melalui forum-forum diskusi dan organisasi kampus, hingga kebangkitan yang lebih terbuka pada masa reformasi dengan tuntutan pembatalan DOM dan penegakan HAM. Pasca reformasi, gerakan ini mengalami perubahan orientasi ke isu-isu lokal seperti otonomi daerah dan pemberantasan korupsi, namun juga menghadapi tantangan baru seperti fragmentasi internal, kooptasi politik, dan menurunnya idealisme. Meskipun demikian, mahasiswa Aceh tetap memainkan peran penting sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses demokratisasi dan pembangunan daerah.

5. Daftar Pustaka

- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fautanu, I. (2025). *Sejarah Partai Politik di Indonesia*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, 1(1), 1–109.
- Jayanti, K. (2013a). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005. *Buletin Al-Turas*, 19(1), 49–70.
- Jayanti, K. (2013b). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005. *Buletin Al-Turas*, 19(1), 49–70.
- Jazimah, I. (2013). MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 3(01). <https://core.ac.uk/download/pdf/229500651.pdf>
- Muzakar, A. (2019a). *Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Karl Marx*. Yayasan Suluh Rinjani. <https://eprints.hamzanwadi.ac.id/5144/1/Buku%20Gerakan%20Mahasiswa.pdf>
- Muzakar, A. (2019b). *Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Karl Marx*. Yayasan Suluh Rinjani. <https://eprints.hamzanwadi.ac.id/5144/1/Buku%20Gerakan%20Mahasiswa.pdf>
- Oetama, J. (2001). *Berpikir ulang tentang keindonesiaan*. Penerbit Buku Kompas.
- Syam, H. M. (2015). Sistem penyiaran di Aceh dari era kolonial Belanda hingga orde baru: Satu perspektif sejarah. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 21(2). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/426>
- Tirtosudarmo, R. (2022). *Mencari Indonesia 1: Demografi-Politik Pasca-Soeharto (BW)*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

- Wendra, Y. (2021). *NAGARI DAN NEGARA; Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*. <http://eprints.umsb.ac.id/1548/1/Buku.pdf>
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(01), 136–158.